

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Desa Wisata menjadi program prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, disebutkan bahwa Desa Wisata menjadi salah satu destinasi pariwisata berkelanjutan skala kecil. Penetapan Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan melalui regulasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan. Program Desa Wisata ini penting, bukan hanya dalam mendukung tercapainya pariwisata berkelanjutan tetapi juga meningkatkan konservasi kekayaan lokal baik *tangible* maupun *intangible* serta mendukung capaian pembangunan desa. Program berikut sekaligus membantu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mengkonkretkan program SDGs Desa sesuai amanat Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Adapun capaian SDGs Desa tersebut dikategorikan dalam beberapa aspek, yaitu: 1) Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan; 2) Pertumbuhan Ekonomi Desa; 3) Desa Peduli Kesehatan; 4) Desa Peduli Lingkungan; 5) Desa Peduli Pendidikan; 6) Desa Ramah Perempuan; 7)

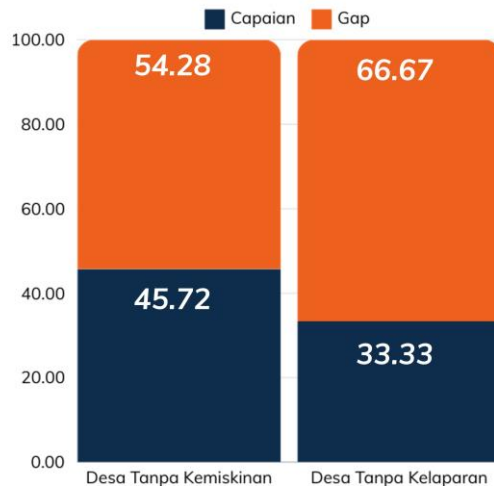
Desa yang Terhubung; dan 8) Desa Responsif akan Budaya (Puspitasari, C., Sulistyowati, F., Tyas, B. H. S., & Dibyorini, M. C. R: 2024).

Program Desa Wisata berkomitmen mewujudkan pembangunan desa melalui sektor pariwisata. Sebanyak 4.573 dari 83.971 desa di Indonesia mendaftar pada program Desa Wisata Kemenparekraf tahun 2023. Adapun Kabupaten Semarang menetapkan 74 Desa Wisata melalui Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor: 556/0217/2022 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Semarang. Salah satu desa wisata rintisan Kabupaten Semarang ada di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Aktivitas pariwisata di desa Nyatnyono disokong oleh aktivitas wisata religi di destinasi wisata religi berupa Sendang Kalimat Tayyibah, Makam Mbah Hasan Munadi dan Mbah Hasan Dipuro (Rahmadani dan Gunawan, 2024). Destinasi wisata religi Desa Nyatnyono yang diklaim sebagai desa wisata berstatus rintisan ini bukan berarti baru dibentuk, justru kehadiran desa-desa dalam menawarkan pelayanan wisata sudah dimulai sejak lama. Apabila ditelusuri secara historis, Desa Wisata Nyatnyono ditetapkan menjadi Desa Wisata pada tahun 2020 dan dilegalkan dalam SK Penetapan 74 Desa Wisata Kabupaten Semarang tahun 2022, namun secara aktivitas lapangan Desa Wisata Religi Nyatnyono beraktivitas di sektor wisata religi semenjak nenek moyang (sebelum lahirnya program desa wisata oleh Kemenparekraf). Permasalahannya adalah perkembangan desa wisata sangat lambat atau bahkan tergolong mengalami stagnansi. Hal ini dilatarbelakangi oleh status kepemilikan destinasi wisata yang

sebetulnya adalah milik kelompok tertentu namun ditetapkan menjadi bagian dari Desa Wisata Nyatnyono (Handitya dan Kumalasari, 2023).

Meskipun kondisinya hari ini masih tumpang tindih namun Desa Wisata Nyatnyono memiliki potensi besar untuk menjadi Desa Wisata Mandiri. Potensi tersebut berasal dari kekayaan alam, sosial dan budaya yang dimiliki oleh Desa Nyatnyono. Kekayaan alam memuat pemandangan alam yang layak jual, kepemilikan area pendakian dan *camping ground* (Rahmawati, 2019). Adapun Destinasi Wisata Religi yang kental dengan kekayaan religius. Desa Nyatnyono cukup menjadi pemantik bagi aktivitas pariwisata yang lain dan cukup disinergikan dengan aktivitas-aktivitas pariwisata yang lain.

Pada kondisi inilah suatu desa membutuhkan peran BUMDes untuk menjadi fasilitator terbentuknya sinergitas pariwisata serta mencapai cita-cita kemandirian desa di sektor ekonomi melalui sektor pariwisata. Desa Nyatnyono sendiri yang sudah ramai dalam aktivitas pariwisata khususnya wisata religi belum ditemukan koherensi dengan kondisi ekonomi desa, fakta ini tergambar dari capaian SDGs Desa Nyatnyono sebagai berikut:



Grafik 1. 1 Capaian SDGs Desa Nyatnyono oleh Kemendesa 2024

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata di Desa Nyatnyono belum berdampak secara eksponensial terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Nyatnyono. Di tengah aktivitas pariwisata yang sudah ada tentunya hal ini menjadi celah yang dapat diintervensi oleh BUMDes. Destinasi wisata religi berupa Sendang Kalimat Tayyibah, Makam Mbah Hasan Munadi dan Makam Mbah Hasan Dipuro yang masih menjadi poros aktivitas pariwisata Desa Nyatnyono. Sehingga prioritas utama untuk menarik benang kebermanfaatan ekonomi dari sektor pariwisata adalah dengan membangun dan memberdayakan area destinasi wisata religi tersebut. Upaya ini ditempuh dengan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada UKM dan UMKM di sekitaran destinasi. Pemerintah Desa Nyatnyono menyadari bahwa aktivitas ekonomi yang

terjadi di Desa Nyatnyono harus difasilitasi untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, tuntutan dari pemerintah pusat dan daerah menyulut lahirnya BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono tahun 2017. Hadirnya BUMDes diharapkan mampu menjadi stimulus roda perekonomian di Desa Nyatnyono.

BUMDes merupakan satu satunya lembaga milik Pemerintah Desa yang pendiriannya didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. Dalam rangka memastikan keberlanjutan BUMDes, pengelolaan BUMDes dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa untuk bersama-sama meningkatkan ketahanan ekonomi desa. Inisiasi BUMDes sudah muncul di tahun 2004 yang diatur dalam Undang-Undang Tahun 2004 pasal 213, berbunyi: 1) desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; 2) Badan usaha milik desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan 3) Badan usaha milik desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Adanya Undang Undang Tahun 2004 tersebut secara tidak langsung sudah memperkenalkan BUMDes kepada badan otonomi tingkat desa. Meskipun demikian, regulasi yang membahas BUMDes lebih detail baru ada di tahun 2014.

BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono terbentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. BUMDes Sejahtera Bersama telah memanfaatkan tenaga pengelola dari masyarakat dan

menggunakan modal yang berasal dari pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sejauh ini, BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono terus aktif berdinamika, ranah kerjanya seperti menjalankan usaha unit air, kawasan terminal wisata religi, usaha alat tulis kantor (ATK), pembayaran online, BPJS Ketenagakerjaan dan penginapan (Handitya dan Kumalasari, 2023). Menurut penelitian Kumalasari dan Handitya (2023) ditemukan bahwa usaha yang paling menguntungkan dari BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono adalah terminal di area wisata religi dan unit air.

Destinasi wisata religi Desa Nyatnyono merupakan ladang dan aset besar dalam membangun perekonomian masyarakat sekitar. Apalagi destinasi wisata dalam lingkup desa ini digadang-gadang berpotensi besar dalam memberdayakan kesejahteraan finansial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Namun, destinasi wisata religi di Desa Nyatnyono yang dikelola oleh sebagian orang dan masuk dalam aset semi privat menjadikan kebermanfaatan ekonominya tidak dirasakan menyeluruh oleh masyarakat Desa Nyatnyono secara umum (bukan kelompok agamis). Pengelola utama dari destinasi tersebut adalah keturunan kyai atau tokoh agama di Desa Nyatnyono, mereka merasa memiliki otoritas lebih akan destinasi tersebut (Handitya dan Kumalasari, 2023). Secara natural fenomena tersebut mengantarkan masyarakat agamis (agama islam) yang mendominasi aktivitas transaksi wisata di destinasi tersebut. Dengan demikian, desentralisasi ekonomi kepada seluruh masyarakat Desa Nyatnyono menjadi terhambat karena keterbatasan intervensi pemerintah. Selain itu,

performa daya saing pariwisata (khususnya dari aspek infrastruktur, kebersihan, kenyamanan pengunjung, dan *branding*) cukup sulit berkembang secara eksponensial. Terbukti, wisata religi Desa Nyatnyono mengalami stagnasi dari perangkingan desa wisata baik oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang maupun Kemenparekraf. Kondisi tersebut merupakan dampak dari tertutupnya intervensi lembaga pemerintah untuk turut membangun destinasi wisata religi tersebut.

Untuk itu, diperlukan intervensi pemerintah Desa Nyatnyono melalui tangan BUMDes guna mewujudkan sirkulasi ekonomi yang sehat di area destinasi wisata religi Nyatnyono. Hadirnya BUMDes sebagai perwalian dari pemerintah desa dalam memberikan fasilitas bagi pergerakan ekonomi di sekitar destinasi wisata secara nihil menjadi prasyarat terwujudnya pengelolaan desa wisata yang serasi dan terintegrasi, sekaligus mendorong Desa Nyatnyono keluar dari lingkaran stagnasi pada aspek pembangunan destinasi dan tamat memperoleh rapor merah dalam SDGs Desa poin 1 dan 2 (*no poverty* dan *zero hunger*). Terlepas dari kompleksitas permasalahan yang ada, jalan pertama yang paling vital adalah memastikan kapasitas kelembagaan BUMDes untuk bekerja menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kekuatan BUMDes untuk memfasilitasi dan memberdayakan ekonomi masyarakat bergantung pada kapasitas kelembagaan yang dimilikinya. BUMDes Sejahtera Bersama tidak memiliki cukup *power* tanpa kerangka institusional yang kuat dan dinamis dalam tubuh BUMDes. Kekuatan kelembagaan BUMDes

dipengaruhi oleh beberapa hal mencakup keterbatasan akses permodalan, limitasi akses teknologi, sengketa kepemilikan unit usaha, isu keanggotaan, birokrasi pemerintah, kepemimpinan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (B. Arifin et al, 2020). Untuk itu penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes dalam menjawab tantangan-tantangan *existing* BUMDes adalah pijakan awal yang harus segera dipenuhi.

Penelitian ini melihat dimensi yang berbeda dari beberapa penelitian tentang BUMDes Sejahtera Bersama. Perbedaan berikut dilihat dari lima dimensi yang digunakan untuk mengidentifikasi kapasitas kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama, mencakup kepemimpinan, manajemen perencanaan, manajemen pelaksanaan, alokasi sumber daya dan relais dengan pihak eksternal. Penelitian terdahulu lebih banyak melihat BUMDes Sejahtera Bersama dari segi sumber daya. Pada penelitian yang lain, lebih banyak ditemukan bahasan tentang pengelolaan destinasi wisata religi Desa Nyatnyono.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang?
2. Faktor apa saja yang berkaitan dalam kapasitas kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan deskripsi tentang kapasitas kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono.
2. Untuk memberikan rekomendasi model penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono dalam menjawab masalah dan tantangan yang dihadapi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diproyeksikan dapat memberi dampak baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diproyeksikan mampu berkontribusi dalam penelitian mendatang terutama dalam mengidentifikasi kapasitas kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama untuk Memfasilitasi Ekonomi Masyarakat Sekitar Destinasi Wisata Religi Desa Nyatnyono. Selanjutnya, Penelitian berikut juga dirancang untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai kapasitas kelembagaan sebagai instrumen mewujudkan BUMDes yang berkualitas.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini didesain dapat memberi manfaat:

1. Bagi Peneliti

Penelitian berikut dirancang agar mampu menjadi media penggalan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan aktivitas riset dan penulisan yang baik. Selain itu, menjadi media pembekalan bagi mahasiswa Administrasi Publik untuk mengimplementasikan ilmu teoretis yang diperoleh dalam bangku perkuliahan dengan fenomena empiris yang didapatkan di lapangan. Pembelajaran dan pengalaman dalam penelitian ini dapat menjadi bagian dari persiapan mahasiswa untuk menghadapi kehidupan pasca perkuliahan.

2. Bagi BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono serta menawarkan *output* nyata dalam bentuk sinkronisasi dan harmonisasi BUMDes dengan pengelola destinasi wisata religi di Desa Nyatnyono. Selain itu, BUMDes Sejahtera Bersama mampu meningkatkan distribusi dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat di area destinasi wisata religi Desa Nyatnyono melalui program-program yang dicanangkan.

3. Bagi Masyarakat di Sekitar Destinasi Wisata Religi Nyatnyono

Masyarakat di sekitar area wisata religi Desa Nyatnyono dapat semakin berdaya untuk melakukan aktivitas perekonomiannya, memiliki modal pengetahuan yang cukup dalam membangun UKM dan UMKM di sekitar destinasi, dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang optimal dari aktivitas transaksi di area destinasi wisata religi Desa Nyatnyono.

1.5 Literature Review

No	Nama Jurnal	Teori	Fenomena	Indikator	Faktor Yang Mempengaruhi	Kegunaan dalam Penelitian
1.	Global Education Cluster. <i>Framework for Strengthening the Institutional Capacity of National and Local Actors</i>	<i>Institutional Capacity</i> (IC) adalah salah satu dimensi dari kelima dimensi yang dikembangkan oleh <i>The Protection and Education Clusters</i> . IC menjadi penguatan kapasitas teknis yang mendorong koordinasi tim lebih sistematis dan berkontribusi dalam menguatkan fungsi operasional guna meningkatkan pelayanan.	<i>Institutional Capacity</i>	Indikator <i>Institutional Capacity</i> : 1. <i>Financial Management</i> 2. <i>Human Resource Management</i> 3. <i>Information Technology</i> 4. <i>Institutional Governance</i> 5. <i>Leadership</i> 6. <i>Management</i> 7. <i>Resource Mobilization</i> 8. <i>Risk Management</i> 9. <i>Project Management</i> 10. <i>Procurement</i>	Literatur tidak menyebutkan faktor-faktor yang mmepengaruhi kapasitas kelembagaan.	Penelitian ini berkontribusi untuk menjadi alat atau <i>tools</i> dalam mendeskripsikan kondisi permasalahan di Desa Wisata Rintisan Nyatnyono Kabupaten Semarang. Penelitian berikut juga menjadi referensi solusi bagi penguatan <i>Institutional Capacity</i> Desa Wisata Nyatnyono melalui penguatan internal, yaitu peguatan aktor (<i>training, mentoring</i> dan <i>coaching</i>), transformasi etika aktor dalam praktek IC, transformasi kebijakan dan prosedur operasional pengelolaan desa wisata. Literatur berikut juga memberikan tahapan dalam menguatkan kapasitas institusional suatu instansi atau komunitas (termasuk desa wisata

				<i>Management Systems</i> 11. <i>Supply Chain management and Logistics</i>		Nyatnyono), meliputi: <i>engage; assess; formulate; implement; and evaluate.</i>
2.	Julaeha, S., Rahmawati, R., & Harini, S. (2021). INSTITUTIONAL CAPACITY DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGE IN SUKABUMI DISTRICT. ADMINISTRATIE Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 103-110.	Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep <i>Village Tourism</i> (Atmoko, 2014) bahwa pada prinsipnya <i>Village Tourism</i> adalah salah satu produk pariwisata yang mendorong tercapainya pembangunan desa berkelanjutan.	<i>Institutional Capacity Development</i>	Indikator <i>Institutional Capacity Development</i> di Desa Sukagalih diukur menggunakan: 1. <i>Information Technology Factor</i> 2. <i>Human Resources Factors</i> 3. <i>Cooperation Factors between Stakeholders</i>	Faktor yang mempengaruhi <i>Institutional Capacity Development</i> di Desa Sukagalih: 1. Dukungan pemerintah 2. Kesiapan organisasi 3. Tingkat inovasi 4. Dorongan dari pengunjung 5. Konflik	Literatur berikut memberikan pandangan lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian <i>Institutional Capacity Development</i>, yaitu mencakup 5 hal: Dukungan pemerintah; Kesiapan organisasi; Tingkat inovasi; Dorongan dari pengunjung; dan Konflik. Kelima faktor tersebut dapat berperan sebagai penghambat dan pendorong <i>Institutional Capacity Development</i> selaras dengan sifatnya yang positif atau negatif. Kelimanya menjadi referensi bagi penelitian <i>Institutional Capacity</i> di Desa Wisata Nyatnyono Semarang.

3.	Rahmadani, A., & Gunawan, G. (2024). Pengembangan Desa Wisata Religi Berbasis Budaya Lokal di Desa Nyatnyono. Umbara, 8(2), 87-100.	Penelitian berikut menggunakan Teori Protestan Weber untuk menganalisis kinerja BUMDes. Teori etika Protestan Weber pada tahun 1905 menjelaskan hubungan antara keyakinan agama, khususnya Calvinisme, dengan perkembangan ekonomi. Weber berpendapat bahwa nilai-nilai yang dipromosikan dalam Calvinisme, seperti kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan penghematan, memberikan	Etika Pengelola Wisata	Menurut Weber (1905) etika dalam mengelola wisata dalam konteks ini dikhususkan pada BUMDes Desa Nyatnyono sebagai berikut: 1. Kerja Keras 2. Disiplin	Indikator optimalisasi BUMDes dalam pengembangan pariwisata religi mencakup: 1. Pengembangan dan diversifikasi sektor pariwisata 2. Pemberdayaan BUMDes 3. Pengembangan sektor pertanian dan agrobisnis 4. Peningkatan kualitas SDM 5. Kemitraan	Penelitian berikut memberikan kontribusi pada penelitian penguatan kapasitas kelembagaan desa wisata rintisan khususnya di Desa Nyatnyono karena memberikan informasi detail akan kondisi Desa Wisata Nyatnyono terkini (tahun 2024). Penelitian berikut sekaligus memberikan informasi aktual salah satu kelembagaan desa wisata di Desa Nyatnyono yaitu BUMDes. Jurnal berikut merupakan sumber literatur utama dalam penelitian ini. Sebagian besar informasi yang melatarbelakangi proses analisis permasalahan dalam penelitian ini diambil dalam jurnal berikut. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian lanjutan yang menjawab permasalahan sinkronisasi BUMDes dengan Pengelola Destinasi Wisata Religi Nyatnyono guna mewujudkan distribusi ekonomi merata bagi masyarakat di sekitar destinasi.
					Faktor penghambat BUMDes Nyatnyono dalam mewujudkan keberlanjutan ekonomi desa: - Kendala	

		dorongan untuk mencapai keberhasilan ekonomi (Weber, 1989). Penelitian berikut diperkaya dengan literatur lain yang relevan dengan peran BUMDes dalam Desa Wisata.			pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal, - Kurangnya keterampilan manajerial, serta Keterbatasan akses terhadap modal dan sumber daya	Penelitian dengan lokus pada BUMDes suatu desa wisata memberikan pertanyaan sekaligus perdebatan mengenai, “<i>apakah peran pemerintah desa dalam mendukung daya saing suatu destinasi dapat diwakilkan oleh BUMDes sebagai lembaga khusus di bawah legitimasi pemerintah desa?</i>”, “<i>apakah intervensi pemerintah desa yang diwaliklan oleh BUMDes menjaid model intervensi positif yang mendukung daya saing suatu destinasi dengan optimal?</i>”.
4.	Rahmayani, D., Putri, P. I., Rahman, Y. A., Pratiwik, E., & Vikia, Y. M. (2023). Scale Up Kapabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Desa Dengan Aplikasi	Jurnal berikut tidak memuat teori dalam penulisannya, melainkan hanya konsep-konsep yang mendukung penulisan yaitu konsep Desa	Scale Up Kapabilitas	Tahapan Scale Up Kapabilitas, mencakup: 1. Persiapan Kegiatan 2. Sosialisasi dan Pelatihan 3. Pemantauan Lapangan	Faktor yang mempengaruhi Scale Up Kapabilitas Keuangan BUMDes: 1. Pencampuran urusan pribadi dengan urusan	Literatur berikut memberikan referensi data tentang kategorisasi desa wisata di Kabupaten Semarang menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) tahun 2021, menyatakan bahwa Desa Wisata Nyatnyono masuk dalam kategori Potensial diantara kedua

	Sistem Informasi Desa Mandiri (SIDesRi). Madaniya, 4(1), 337-347.	Wisata menurut Saepudin (2019) menyatakan bahwa pengembangan desa wisata harus berdasarkan pada 3 prinsip, yaitu 1) tidak bertentangan dengan budaya lokal, 2) pembangunan ditujukan guna peningkatan kualitas lingkungan dan 3) pemberdayaan masyarakat.			Desa Wisata 2. Literasi Keuangan	kategori yang lain (Andalan dan Unggulan). Peneliti melakukan update data terbaru untuk digunakan dalam penelitian penguatan kapasitas Desa Wisata Nyatnyono. Lebih lanjut, penelitian berikut tidak memberikan banyak kontribusi karena fokus kajiannya yang cukup jauh dari kajian penguatan kapabilitas desa wisata secara umum. Tetapi dapat diadaptasi di indikator keuangan desa wisata dan dapat menjadi tawaran teknis pengelolaan keuangan desa wisata yang relevan di Desa Wisata Nyatnyono, Kabupaten Semarang. Literatur ini lebih membantu untuk penelitian yang terspesialisasi pada peningkatan keuangan BUMDes dalam mendongkrak pengelolaan destinasi desa wisata.
--	--	--	--	--	--	--

5.	Kumalasari, A., & Handitya, B. (2023). Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat. <i>ADIL Indonesia Journal</i> , 4(2), 24-30.					Penelitian berikut membantu memberikan eksplanasi ilmiah mengenai BUMDes Desa Nyatnyono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono yang sudah berjalan selama 9 tahun dengan operasional BUMDes Sejahtera Bersama yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 204 pasal 213, yang berisi pendirian BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, serta berjalan secara demokratis melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Ranah kerja BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono diantara adalah menjalankan usaha unit air, Kwasan terminal wisata religi, alat tulis kantor (ATK), pembayaran online, BPJS Ketenagakerjaan dan penginapan.
6.	Rumkel, L., Sam, B., &	Sistem kemitraan	<i>Partnership</i>	Prinsip <i>partnership</i> menurut	Faktor yang	Prinsip partnership atau kemitraan yang

	Umanailo, M. C. B. (2019). Village head partnership, village consultative body and customary institution in village development. <i>Int. J. Sci. Technol. Res</i>, 8(8), 1058-1063.	didasarkan pada kepercayaan menurut M. H. Pratiknjo (2016), diantaranya mencakup (a) persamaan dan organisasi yang lebih adil, (b) hierarki aktualisasi yang lentur dan fleksibel, (c) spiritualitas berbasis alam, dan (d) rendahnya tingkat kekacauan yang terbentuk dalam Sistem (e) Kesetaraan gender dan keadilan.		G. Kartasasmita (1996) 1. <i>Equality</i> 2. <i>Transparency</i> 3. <i>Mutually Beneficial</i>	mempengaruhi aktivitas <i>partnership</i> adalah komunikasi, adapun komunikais dipengaruhi oleh kelemahan pemahaman informasi oleh pihak yang tergabung dalam kemitraan.	dibawa dalam literatur berikut dapat menjadi referensi dan landasan ilmiah untuk menciptakan model hubungan pemerintah desa dan destinasi wisata yang suportif. Pemerintah desa dan pengelola desa wisata adalah satuan entitas yang berbeda yang sering terjadi pertengkar di lapangan, misalnya adalah pemerintah desa memberikan intervensi terlalu mengikat pada suatu destinasi sehingga destinasi tidak memiliki ruang gerak untuk berdaya saing atau pun pemerintah desa yang terlalu melepas tangan sehingga destinasi wisata tidak dapat berkembang. Untuk mendukung daya saing wisata yang unggul, kedua belah pihak harus saling mendukung dan saling mempercayai, adapun hubungan ideal antara pemerintah desa dnegan pengelola desa wisata akan terjamin apabila keduanya menerapkan prinsip <i>equity</i>, <i>transparency</i>, dan <i>mutually</i>
--	--	--	--	---	---	--

						<i>beneficial.</i>
--	--	--	--	--	--	--------------------

7.	Murthi, N. W., Utama, M. S., Saskara, I. A. N., & Marhaeni, A. A. I. N. (2022). Government role, BUMDes performance on inclusive growth in coastal village, Badung Regency. International Journal of Health Sciences, 6, 8879-8890.	Penelitian berikut menggunakan teori Dumairy (1999) Dumairy (1999) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran atau fungsi yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.	Peran Pemerintah	Indikator peran pemerintah: 1. Regulasi 2. Pelayanan 3. Pemberdayaan	Literatur tidak menyebutkan faktor-faktor yang mmepengaruhi kapasitas kelembagaan.	Peran pemerintah dalam suatu pembangunan dapat dijelaskan secara teoretis oleh Dumairy (1999), yang membagi peran atau fungsi pemerintah dalam tiga bagian yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi. Dan fungsi stabilisasi. Teori yang disampaikan oleh Dumairy menjadi pengayaan penulis dalam menganalisis peran pemerintah desa Nyatnyono dalam mendukung destinasi wisata religi di Desa Nyatnyono. Jurnal berikut juga mmeberikan penjelasan mengenai indikator suatu pemerintah dikategorikan memberikan peranna optimal bagi pembangunan desa wisata, indikator tersebut adalah regulasi, pelayanan dan pemberdayaan.
----	---	--	------------------	---	--	--

8.	Andalecio, A. B. P., Rose, G. A. T., Isidro, M. R. J., Lee, A. T. J. J. A., Martinez, K. L. P., Dionisio, R. A. M. M., ... & Valentin, A. V. W. T. (2022). Assessing the community-based tourism potentials of Romblon, Philippines: A structural equation model. <i>Journal of tourism, culinary and entrepreneurship</i> (JTCE), 2(2), 174-199.	Penelitian berikut menggunakan teori peran pemerintah menurut Pitana dan Gayatri (2005) sebagai berikut: 1. Motivator, yaitu peran pemerintah untuk memantik motivasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata guna menjaga kelangsungan bisnis pariwisata tetap berjalan 2. Fasilitator, yaitu peranan pemerintah dalam memberikan semua fasilitas untuk mendukung semua program yang	Peran pemerintah lokal	Peran pemerintah lokal dalam pengembangan potensi pariwisata di daerah (Pitana dan Gayatri: 2005): 1. Motivator 2. Fasilitator 3. Dinamisator	Literatur tidak menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kelembagaan.	Penelitian berikut memberikan kontribusi pada penelitian peran pemerintah desa dalam mendukung daya saing destinasi wisata Religi Desa Nyatnyono, yaitu dalam memberikan kategorisasi peran pemerintah desa apakah masuk sebagai motivator, fasilitator atau dinamisator. Apabila pemerintah desa berhasil memenuhi ketiga peran tersebut maka dinyatakan bahwa peran pemerintah desa nyatnyono sudah ideal dalam mendukung daya saing destinasi wisata religi Desa Nyatnyono.
----	---	---	------------------------	--	--	---

		diselenggarakan oleh pemerintah 3. Dinamisator, yaitu peran pemerintah untuk mensinergikan ketiga pihak mencakup pemerintah itu sendiri, swasta dan masyarakat guna menciptakan simbiosis mutualisme dalam pengembangan pariwisata.				
--	--	--	--	--	--	--

9.	Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., ... & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. <i>Journal of rural studies</i>, 79, 382-394.	Penelitian berikut mengelaborasi beragam teori tentang <i>Community Driven Development (CDD)</i> dan <i>Community Based Enterprise (CBE)</i>. CDD merupakan sebuah konsep yang mengilustrasikan bagaimana komunitas di tingkat desa menjalankan sebuah program bersama untuk meningkatkan standar hidupnya, implementasi dari program tersebut di dukung denngan pendanaan atau disebut sebagai Dana Desa di Indonesia.	<i>Village Fund</i>	<i>Village Fund</i> diukur dengan menggunakna dua indikator, yaitu: - <i>Village development</i>; dan - <i>Community empowerment</i>.	Faktor yang memoengaruhi capaian BUMDes adalah: - keterbatasan akses permodalan, - limitasi akses teknologi, - sengketa kepemilikan unit usaha, - isu keanggotaan, - birokrasi pemerintah, - kepemimpinan , dan - kapasitas Sumber Daya Manusia	Literatur berikut memberikan kontribusi besar dalam penulisan penelitian ilmiah berikut, khususnya sebagai pemantik dan jendela pengetahuan akan kondisi BUMDes di Pulau Jawa. Kajian dalam literatur berikut mengerucut pada masalah vital entitas bernama BUMDes yaitu pendanaan. Sehingga pembahasan mengenai <i>Village Fund</i> atau Dana Desa lengkap dipaparkan dengan data-data dan perhitungan metodologis. Indonesia menggelontorkan dana desa kepada 74.958 desa dengan formulasi perumusan alokasi dananya menggunakan indikator populasi general, populasi masyarakat miskin, area desa dan indeks geografis. Operasional BUMDes di Pulau Jawa juga dipaparkan dengan padat, utamanya bagaimana mayoritas BUMDes menggunakan unit kerjanya di sektor jasa finansial, perdagangan,
----	--	--	----------------------------	---	--	---

		Adapun CBE adalah sebuah bentuk organisasi yang mengkombinasikan mekanisme bisnis dengan komunitas. Konsep BUMDes yang dijalankan di Indonesia dinyatakan koheren dengan CBE dalam literatur berikut.				penyewaan, pelatihan pariwisata dan kontraktor fasilitas-fasilitas publik.
--	--	--	--	--	--	---

10.	Siahaan, A. Y., Pardede, P. D. K., & Hutapea, Y. F. (2022, February). Capacity Mapping and Institutional Management Model of Village Owned Enterprises (BUMDes) in North Sumatra. <i>In Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)</i> (pp.442-450). Atlantis Press.	Penelitian berikut berlandaskan teori Oliver Williamson (2000) tentang analisis empat level perubahan kelembagaan atau institusi yaitu level sosial, level lingkungan formal, level tata kelola atau <i>governance</i> dan level perubahan berkelanjutan.	<i>Institutional Capacity</i>	Indikator kapasitas kelembagaan diukur melalui: - <i>Strategic leadership</i> - <i>Program planning management</i> - <i>Management and execution</i> - <i>Allocation of owned resources</i> - <i>Relations with external parties</i>	Lemahnya performa BUMDes dipengaruhi oleh: - Tingkat kepaahaman <i>stakeholders</i>, - Sub-ordinasi peran antar <i>stakeholders</i>, dan - Inefektifitas jaringan.	Penelitian berikut menjadi referensi utama yang digunakan oleh penulis dalam merumuskan hasil penelitian tentang kapaistas BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono. Penulis mengadopsi indikator-indikator yang digunakan oleh Siahaan et al (2022) untuk mengamati kapasitas kelembagaan suatu BUMDes.
-----	---	---	-------------------------------	--	--	---

1.6 BUMDes

BUMDes merupakan formasi dari entitas bisnis bersama di skala desa, peranannya berpengaruh signifikan dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Nurhazana dan Wahyuni, 2020). Kesatuan BUMDes ini bergerak dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk disulap menjadi potensi ekonomi desa, dalam prosesnya didukung dengan manajemen finansial dan praktik akuntansi yang inheren (Nurhazana dan Wahyuni, 2020). Operasional BUMDes didukung oleh pemerintah melalui alokasi dana desa, sejak tahun 2015-2019 Pemerintah berhasil menggelontorkan dana desa mencapai 268 triliun rupiah guna membangun desa secara merata (Arifin et al, 2020). Dalam perjalanannya, BUMDes mematangkan dua komponen prioritas yaitu pemberdayaan komunitas dan pembangunan ekonomi (Arifin et al, 2020; dan Kurnianto et al, 2021) BUMDes bergerak untuk membangun ekonomi desa dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal untuk memaksimalkan capaian-capaian ekonomi dalam kehidupan masyarakat desa tersebut. Faktor utama yang memiliki pengaruh vital dalam manajemen BUMDes adalah *community participation* atau partisipasi masyarakat (Maryunani M, 2023). Untuk itu, melalui pelibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, BUMDes akan menjadi lebih *resilient* dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan kelompok dalam BUMDes. Penelitian telah membuktikan bahwa *community participation* di

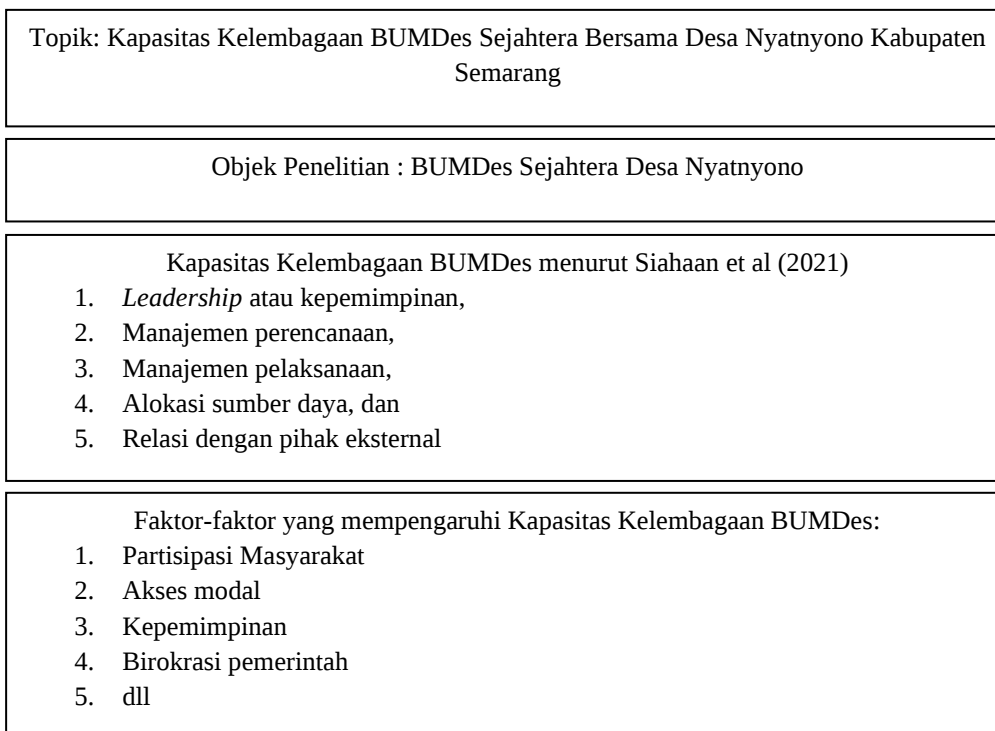
dalam BUMDes efektif meningkatkan pendapatan, menguatkan institusional BUMDes, membangun rasa kepemilikan dan pemberdayaan masyarakat lokal di dalam BUMDes (Maryunani M, 2023). Banyak literatur ilmiah yang menegaskan bahwa dalam menjalankan BUMDes penting untuk memberdayakan ekonomi lokal, manajemen finansial yang baik, tata kelola yang mendukung dan partisipasi masyarakat yang inklusif. BUMDes dapat bergerilya dengan memanfaatkan sumber daya lokal, pemberdayaan komunitas, menerapkan praktik keberlanjutan hingga menjadi pemain utama dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

1.7 Kapasitas Kelembagaan BUMDes

Sebagai suatu formasi kelembagaan di tingkat desa, BUMDes memainkan peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi di suatu desa. BUMDes bergerak dengan melakukan manajemen sumber daya dan asset desa untuk diolah menjadi sumber pendapatan desa (Nuraini, 2020). Dalam menjalankan tugasnya, BUMDes tidak hanya tegak lurus menyalurkan amanat Pemerintah Desa kepada masyarakat, BUMDes juga merangkul *stakeholder*, *shareholder*, komunitas dan masyarakat sesuai dengan obyek kerja dari BUMDes, tujuan utamanya tidak lain adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi desa (Nuraini, 2020). Keberadaan BUMDes tidak cukup dilihat dari aspek eksistensinya, namun juga penting untuk melihat BUMDes dari aspek kapasitas kelembagaannya. Kapasitas kelembagaan BUMDes yang baik akan berdampak pada kemampuan BUMDes untuk menjalankan tugasnya dan mencapai obyektifitas-obyektifitas yang

direncanakan. Kapasitas Kelembagaan BUMDes dapat dianalisis melalui banyak instrumen, adapun dalam penelitian berikut untuk melihat kapasitas kelembagaan BUMDes secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan dasar teori menurut Siahaan et al (2021) bahwa kapasitas kelembagaan BUMDes dapat dilihat dalam lima aspek pengamatan yaitu 1) *leadership* atau kepemimpinan, 2) manajemen perencanaan, 3) manajemen pelaksanaan, 4) alokasi sumber daya dan 5) relasi dengan pihak eksternal.

1.8 Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 1.2 Outline Penelitian

Sumber: Peneliti, 2024

Penelitian berikut mengambil topik kapasitas kelembagaan BUMDes untuk memfasilitasi ekonomi masyarakat di sekitar area destinasi wisata religi Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang. Adapun objek penelitian berada di BUMDes

Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono yang sudah berdiri sejak tahun 2017 sesuai dengan regulasi pemerintah tentang pembentukan BUMDes, yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Topik berikut diangkat atas dasar permasalahan yang ditemukan oleh peneliti, yakni keberlanjutan ekonomi desa yang belum terbentuk di sisi aktivitas pariwisata religi yang selalu ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Kondisi perekonomian di Desa Nyatnyono dilihat dari Indeks SDGs Desa Poin 1 dan 2 yang masih pada level merah. Indeks SDGs Desa yang dirilis oleh Kementerian Desa PDTT menyebutkan bahwa skor Poin Satu (Desa Tanpa Kemiskinan) adalah 45,72 dan Poin Dua (Desa Tanpa Kelaparan) adalah 33,33. Dengan demikian, kondisi perekonomian Desa Nyatnyono belum berada pada tataran ideal. Dengan melihat kondisi Desa Nyatnyono yang memiliki struktur kelembagaan BUMDes yang aktif sejak 2017 dan memiliki aktivitas pariwisata yang tidak sepi, sehingga menjadi pertanyaan mengapa terdapat gap antara aktivitas pariwisata dengan ekonomi masyarakat Desa Nyatnyono.

Gap permasalahan tersebut kemudian dianalisis kembali oleh penulis dengan bersumber jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rahmadani & Gunawan (2024) dan Kumalasari & Handitya (2023) ditemukan adanya akar masalah yang menyebabkan kondisi tersebut, yaitu sentralisasi manfaat ekonomi destinasi wisata religi Nyatnyono oleh masyarakat kalangan agamis dan asinkronisasi program BUMDes dengan Pengelola Destinasi Wisata Religi Nyatnyono. Kedua hal tersebut sebetulnya dapat selesai dan distabilkan oleh BUMDes, namun kemudian muncul anak masalah dari keduanya yaitu ketidakmampuan BUMDes dalam mengintervensi permasalahan

tersebut. Faktor yang melatarbelakangi kelemahan BUMDes Sejahtera Bersama dapat dikategorikan dalam dua aspek, yaitu eksternal berupa lemahnya intervensi BUMDes diantaranya adalah 1) adanya kepentingan adat khususnya tokoh-tokoh agama untuk mengelola destinasi wisata sehingga destinasi merupakan sektor semi privat dan 2) lemahnya sinergitas antara pengelola destinasi dengan BUMDes. Adapun aspek internal adalah kapasitas kelembagaan BUMDes dalam bergerilya.

Penelitian dengan topik kapasitas kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang. Untuk menjawab kapasitas kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama peneliti menggunakan teori menurut Siahaan et al (2021) bahwa kapasitas kelembagaan BUMDes dapat dilihat dalam lima aspek pengamatan yaitu 1) *leadership* atau kepemimpinan, 2) manajemen perencanaan, 3) manajemen pelaksanaan, 4) alokasi sumber daya dan 5) relasi dengan pihak eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kelembagaan suatu BUMDes mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam struktur dan operasional BUMDes, akses kepada permodalan, kepemimpinan BUMDes yang progresif dan *meninfluence* bawahannya untuk terus berkembang, birokrasi pemerintah yang mendukung, dan faktor-faktor lain yang akan ditemukan di lapangan.

1.9 Operasionalisasi Konsep

1.9.1 Kapasitas Kelembagaan BUMDes

Kapasitas Kelembagaan BUMDes adalah kemampuan BUMDes dalam mengelola kelembagaannya secara optimal dilihat dari *leadership* atau

kepemimpinan, manajemen perencanaan, manajemen pelaksanaan, alokasi sumber daya dan relasi dengan pihak eksternal.

a. *Leadership* atau kepemimpinan pada BUMDes Sejahtera Bersama

Merupakan kepemilikan BUMDes kepada figur pemimpin yang inisiatif, komunikatif dan memiliki kemampuan fleksibilitas yang baik dalam menghadapi dinamika kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama.

b. Manajemen Perencanaan

Merupakan kemampuan BUMDes dalam membuat perencanaan operasional BUMDes berupa pengadaan *masterplan* pengembangan dan rencana pengelolaan resiko.

c. Manajemen Pelaksanaan

Merupakan kemampuan BUMDes untuk memastikan optimalisasi operasional BUMDes sesuai dengan *masterplan* didukung dengan reorganisasi yang efektif, hierarki pembagian tugas anggota, pengadaan barang/jasa, manajemen konflik dan manajemen perubahan BUMDes Sejahtera Bersama.

d. Alokasi Sumber Daya

Merupakan kemampuan BUMDes dalam mengelola aset fisik, pengelolaan finansial, dan pengelolaan sumber daya manusia.

e. Relasi dengan Pihak Eksternal

Merupakan kemampuan BUMDes dalam menjaring kerjasama eksternal dan kemampuan komunikasi strategis guna keberhasilan *branding* dan *marketing*.

1.10 Argumen Penelitian

Kapasitas kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama sangat krusial dalam memfasilitasi ekonomi masyarakat di Desa Nyatnyono. Kendala internal seperti keterbatasan modal dan manajerial membatasi kemampuan BUMDes dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Kekurangan ini tidak hanya menghambat operasional BUMDes, tetapi juga mengurangi efektivitas dalam menjalankan program-program ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, adanya masalah eksternal berupa asinkronisasi antara BUMDes dan pengelola destinasi wisata religi yang berasal dari kelompok agamis. Pengelola destinasi wisata yang dominan dari tokoh-tokoh agama memberikan kesan eksklusivitas, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Hal ini menciptakan kesenjangan yang merugikan masyarakat luas dan menurunkan potensi inklusivitas ekonomi desa.

Untuk menjawab masalah tersebut, peneliti mencoba menganalisis secara teoretis dari aspek kapasitas kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama. Kapasitas kelembagaan yang baik mengilustrasikan kondisi BUMDes yang siap bergerilya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2023)

ditemukan bahwa dari 30 pengelola wisata baik berbentuk BUMDes, Pokdarwis maupun Pengelola Destinasi Khusus menyampaikan kendala kelembagaan ada pada sumber modal dan sumber daya manusia. Untuk itu, peningkatan kapasitas internal BUMDes melalui pelatihan manajerial dan akses ke sumber modal yang lebih luas sangat diperlukan. BUMDes perlu memperkuat kemampuan manajemen dan keuangannya agar dapat menjalankan program-program dengan lebih efektif dan efisien. Cara yang ditempuh dapat berupa upaya kolaborasi dengan *stakeholder* dan/ atau *shareholder* lain, ataupun sebatas membangun sinergitas antar *stakeholder* yang ada sehingga tercipta satu garis komando yang harmonis dan saling menguntungkan. Penciptaan kondisi ideal akan manajerial yang baik dibangun dari kolaborasi yang baik, membutuhkan satu komponen penting yang disebut sebagai komunikasi. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antara BUMDes dan pengelola destinasi wisata dapat membantu mengatasi asinkronisasi yang ada dan menciptakan lingkungan yang lebih sinergis.

Perbaikan manajerial dari aspek sumber daya manusia (SDM), perluasan akses modal dan peningkatan komunikasi dan koordinasi antara BUMDes Sejahtera Bersama dengan Pengelola Destinasi Wisata Religi dapat menjadi alternatif jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan puncak masalah dari pembangunan ekonomi masyarakat di sekitaran area destinasi wisata religi Desa Nyatnyono. Tentunya, dalam merealisasikan alternatif-

alternatif yang disarankan tidak akan berlangsung sekali jadi dengan sempurna. Hambatan di lapangan kerap kali lebih kejam dan lebih jauh dari prediksi di awal. Akan tetapi, dengan memulai pergerakan setidaknya BUMDes Sejahtera Bersama mengetahui temuan-temuan baru dari permasalahan yang ada kemudian membuka jalan alternatif penyelesaian lain yang lebih tepat. Keberlanjutan dari peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes ini pada akhirnya tidak terbatas pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan inklusivitas di tengah masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan model kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama yang efektif dan inklusif untuk daerah-daerah dengan potensi wisata serupa.

1.11 Metode Penelitian

1.11.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan pengumpulan data nyata di lapangan dan analisis akan informasi yang tersusun dengan baik. Pendekatan kualitatif mulai dikenal sejak 1990-an dan secara epistemologi adalah non-positivistik. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menginterpretasikan dan memperdalam suatu makna, tidak melakukan generalisasi hubungan sebab akibat. Pendekatan kualitatif merupakan perwujudan dari penjelasan kompleks dan saling berkaitan dalam konsep, masa, dan

asumsi yang memotong beberapa disiplin, bidang dan subjek yang memberikan makna beda dalam konteks historis yang berbeda. (Denzin and Lincoln: 2005). Sehingga penelitian kualitatif sangat kontekstual dan erat dengan antropologi, sosiologi, kemanusiaan dan evaluasi (John W. Cresswell: 2017).

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Fatah (2023) diantaranya adalah kondisi penelitian ada pada kondisi alamiah, bersifat deskriptif, berorientasi pada proses, Analisa dilakukan secara induktif dan penekanan penting pada “makna” atau data dibalik yang teramati. Oleh karena itu, penelitian berikut menempatkan peneliti sebagai bagian dari instrument penelitian yaitu peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan situasi lapangan, peneliti melakukan refleksi atas data-data yang ditemukan di lapangan dan peneliti menuliskan hasil lapangan secara mendetail.

1.11.2 Situs Penelitian

Penelitian tentang kapasitas kelembagaan BUMDes Desa Nyatnyono ini memiliki lokus di BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono dan sekitar area destinasi wisata religi Desa Nyatnyono tepatnya di Sendang Kalimat Tayyibah dan Makam Mbah Hasan

Munadi & Hasan Dipuro Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Peneliti memilih Destinasi Wisata Religi di Desa Nyatnyono karena umur destinasi wisata yang tergolong sangat senior (beroperasi semenjak belum ditetapkan Desa Nyatnyono. Selain itu, kunjungan wisata di destinasi wisata religi tersebut cukup melesat pesat hingga mancanegara (berdasarkan pernyataan pengelola destinasi) namun kondisi lapangan dari destinasi tersebut tidak selaras dengan potensi yang dimiliki khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi masyarakat sekitar destinasi wisata religi. Masalah tersebut mengantarkan peneliti kepada BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji BUMDes Sejahtera Bersama pada batasan area destinasi wisata religi Desa Nyatnyono.

1.11.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono. Penelitian ini melihat bagaimana kapasitas kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono. Adapun dimensi yang disasar dalam BUMDes Sejahtera Bersama adalah kemampuan fisik dan non fisik yang dimiliki BUMDes Sejahtera Bersama serta

peranannya dalam memfasilitasi ekonomi masyarakat secara terbatas di sekitar area destinasi wisata religi Desa Nyatnyono.

1.11.4 Jenis Data

Penelitian dengan judul **“Kapasitas Kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang”** merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan jenis data berupa tulisan, simbol dan gambar yang menjelaskan tentang manusia, perilakunya dan peristiwa yang ditemukan dalam proses penelitian. Penelitian berikut tidak mengkomunikasikan hasil temuannya melalui angka namun menggunakan kata-kata dan kalimat yang dirangkai dalam paragraf.

1.11.5 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah diperoleh dari subjek di mana peneliti melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian berikut merupakan hasil wawancara dengan informan atau narasumber mengenai kapasitas kelembagaan BUMDes dalam relevansinya dengan

distribusi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di area destinasi wisata religi Desa Nyatnyono. Sesuai dengan metode penelitian yang disampaikan oleh Yin (dalam Kusmarni, 2012) bahwa proses wawancara dilakukan secara *open-ended* artinya informan dapat memberikan informasi secara terbuka, bebas dan tidak terbatas. Informan kunci dalam wawancara adalah Direktur BUMDes Sejahtera Bersama dan Kepala Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang. Adapun untuk mendukung data primer khususnya dalam pengamatan kapasitas kelembagaan BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono dilakukan wawancara secara terbuka kepada sekretaris BUMDes Sejahtera Bersama, Bendahara BUMDes Sejahtera Bersama, Pengelola Destinasi Wisata, Ketua Paguyuban Warung Desa Nyatnyono, Anggota Paguyuban Warung Desa Nyatnyono, Masyarakat yang memiliki usaha di sekitar area wisata dan pengunjung destinasi wisata religi Desa Nyatnyono.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada dan bersifat *mute evidence* atau tidak bisa berbicara (Hodder dalam Denzin & Lincoln, 2005). Penelitian ini memperoleh data sekunder dari

sumber tekstual yakni studi literatur digital, yakni berupa referensi dari buku elektronik atau e-book, jurnal, website resmi, dan dokumentasi yang sesuai dengan topik pembahasan.

Peneliti menggunakan sumber jurnal yang dipublikasikan pada rentang lima tahun kebelakang sebagai rujukan sekunder untuk memperoleh informasi tentang Desa Wisata Religi Nyatnyono dan BUMDes Sejahtera Bersama. Adapun rujukan berupa *e-book* lebih banyak digunakan untuk referensi metode penelitian. Data sekunder juga dilengkapi dengan publikasi yang didapatkan dari website resmi desa untuk melihat aktivitas terbaru dari Desa Wisata Nyatnyono dan BUMDes Sejahtera Bersama.

1.11.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diambil melalui berbagai sumber informasi, terlebih di dalam penelitian studi kasus penting untuk melibatkan data yang “kaya” guna menjelaskan secara detail kondisi suatu kasus. Adapun teknik dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi menurut Kontjaraningrat (dalam Suhandoyo, 2011) adalah aktivitas mengamati suatu perilaku untuk membaca dan memahami suatu situasi. Proses observasi diawali dengan identifikasi tempat yang menjadi objek penelitian. Kemudian, membuat pemetaan, hingga diperoleh gambaran secara umum berkaitan dengan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini penyusun melakukan observasi dengan tidak melibatkan pribadi sendiri secara langsung dalam aktivitas pengamatan di lapangan..

2. Wawancara

Wawancara adalah aktivitas untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari informan melalui perbincangan (Kontjaraningrat dalam Suhandoyo, 2011). Peneliti akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan topik dan mengklasifikasikan pertanyaan tersebut sesuai muatan dan urutan prioritas. Peneliti juga memetakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam proses wawancara serta membuat rencana wawancara dengan pihak-pihak tersebut. Proses wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak membatasi sudut pandang pihak-pihak yang diwawancarai. Hasil dari wawancara akan dituliskan dalam transkrip wawancara dan diinterpretasikan untuk mendukung pembahasan penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Suhandoyo (2011), dokumentasi merupakan sumber tertulis yang mendukung suatu penelitian dan diperoleh melalui data-data tertulis. Bentuk dokumentasi yang dapat digunakan adalah laporan penelitian sebelumnya dan laporan kebijakan. Adapun menurut Yin (dalam Kusmarni, 2012) menjelaskan bahwa dokumentasi dapat berupa surat, memorandum, agenda, laporan, hasil penelitian, hasil evaluasi, kliping dan artikel. Sementara, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian berikut berasal dari sumber tertulis dalam bentuk *e-book*, *e-journal*, artikel ilmiah, dan *website* resmi.

1.11.7 Analisis Data

1.11.7.1 Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Fatah (2023) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif melakukan analisis data di lapangan tanpa memiliki pengetahuan yang mendalam atas obyek penelitian. Peneliti membawa pengetahuan terbatas dari data sekunder untuk didalami dengan partisipasi langsung pada aktivitas di obyek penelitian tersebut. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif berikut ini adalah:

a. Tahap Deskripsi

Peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan kepada informan. Tahap deskripsi ini melahirkan data-data yang heterogen dan belum tersusun sistematis, data tersebut dapat berupa huruf, angka dan simbol-simbol yang berserakan.

b. Tahap Reduksi

Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan melakukan *filter* data sesuai dengan kebutuhan. Data-data yang didapatkan dipilih sesuai dengan fokus dan topik penelitian. Kriteria data yang menarik, penting, berguna dan baru menjadi prioritas data yang dipilih untuk analisa lebih lanjut. Tahap reduksi ini dilakukan dengan bantuan *software* Atlas.TI untuk melakukan penyisiran data-data wawancara dan mengumpulkan data yang akan dipakai ke dalam *codes* di dalam *software*.

c. Tahap Seleksi

Tahap seleksi data adalah tahapan seorang peneliti mengurai data terpilih menjadi komponen yang lebih rinci dan teratur. Tahap seleksi dilakukan oleh peneliti dengan membangun *network* di *software* Atlas.TI dari *codes-codes* yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya.

d. Tahap Kesimpulan

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dari hasil seleksi data. Kesimpulan dituliskan dengan konstruksi penulisan sesuai format karya tulis skripsi.

11.7.2 Kualitas Data

Validitas merupakan media penjamin kualitas hasil penelitian yang telah dilakukan. Validitas data dilakukan untuk mengukut ketepatan temuan lapangan dan hasil yang disampaikan oleh peneliti di dalam hasil penelitiannya. Hal berikut menunjukkan bahwa data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang disampaikan oleh peneliti dengan data empiris di lapangan. Untuk melihat validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Stake (dalam Kusmarni, 2012) menyarankan triangulasi sumber data. Triangulasi Sumber merupakan triangulasi yang digunakan untuk melakukan pengujian pada kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian.